

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang ketersediaannya dijamin oleh negara adalah pangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam bentuk kebijakan pangan periode tahun 2015-2019. Strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yaitu dengan memfokuskan pengembangan lima bahan pangan pokok diantaranya padi, jagung, kedelai, gula (tebu), dan daging (Kementan, 2015).

Namun prakteknya masih terdapat banyak kendala dalam mewujudkan ketersediaan pangan. Salah satu yang menjadi faktor sulitnya mewujudkan ketersediaan pangan adalah permasalahan dalam sektor pertanian baik permasalahan agroklimat maupun sosial ekonomi (Supanggih, 2013). Ketersediaan modal yang cukup terutama bagi petani kecil adalah satu dari permasalahan sosial ekonomi pertanian. Ketersediaan modal yang cukup diperlukan petani untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi seperti benih, bibit, pupuk, dan pestisida. Apabila ketersediaan modal tidak mencukupi, hal ini dapat membatasi jumlah pembelian input oleh petani sehingga kondisi ini dapat menyebabkan produksi yang dihasilkan kurang maksimal (Mulyaqin, 2016).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan modal petani yaitu dengan mengeluarkan beberapa skema kredit. Skema kredit yang dapat diakses petani antara lain kredit program KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Berdasarkan peraturan pemerintah No.11 tahun 2017, KUR diprioritaskan untuk sektor produksi. Selain KUR, kredit program KKP-E juga diprioritaskan untuk komoditas pangan seperti padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula), dan daging (Kementan, 2015). Meskipun demikian, secara umum akses petani terhadap kredit terutama yang berasal dari lembaga keuangan formal masih tergolong rendah. Hal ini karena lemahnya kepemilikan modal, prosedur yang rumit, dan ketidakmampuan agunan yang dimiliki petani (Hartono, *et al.* 2013).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah lumbung padi di Jawa Timur dengan total produksi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, sektor pertanian belum terlepas dari berbagai permasalahan sosial ekonomi. Menurut Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Singojuruh, petani masih mengandalkan lembaga keuangan non formal untuk memenuhi kebutuhan usahatannya. Meskipun telah ada skema kredit yang memiliki bunga rendah yaitu KUR Tani, namun masih sedikit petani yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aksesibilitas permodalan petani padi di Desa Gumirih dan faktor-faktor yang mempengaruhi akses petani terhadap sumber permodalan.

Ketersediaan kredit sangat diperlukan dalam pembangunan pertanian, mengingat karakteristik sebagian besar petani Indonesia adalah petani kecil dengan penguasaan lahan yang sempit. Sehingga diperlukan adanya dukungan kebijakan agar tercipta lembaga pembiayaan yang kuat (Hastuti, 2005). Agar ketersediaan modal dapat dijangkau petani ketika membutuhkan dan juga harus memiliki bunga yang rendah (Soetriono, 2006).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akses petani padi terhadap sumber permodalan di Desa Gumirih ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi akses petani padi terhadap sumber permodalan di Desa Gumirih ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis akses petani padi terhadap sumber permodalan di Desa Gumirih.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses petani padi terhadap sumber permodalan di Desa Gumirih.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk program-program pemerintah dalam menyediakan permodalan untuk petani kecil.
2. Sebagai tambahan informasi bagi lembaga keuangan untuk lebih memaksimalkan penyaluran informasi adanya kredit mikro kepada petani kecil.

3. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.